



**RENCANA KERJA (RENJA)
KANTOR KESBANGPOLINMAS
KOTA TEGAL TAHUN 2015**



**KANTOR KESATUAN BANGSA
POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA TEGAL
2014**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun. RKPD tersebut kemudian di-breakdown kedalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Rencana Kerja (Renja) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal Tahun 2015 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal (RPJPD), khususnya Tahap III (2014 - 2019) yang memuat langkah-langkah untuk mendukung tercapainya Visi Kepala Daerah Terpilih yaitu : **“TERWUJUDNYA KOTA TEGAL YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT BERBASIS PELAYANAN PRIMA”**, dan Misi yang kelima adalah **Mewujudkan kesatuan sosial serta ketentraman dan ketertiban masyarakat yang mendorong pemberdayaan dan partisipasi masyarakat**, yang diarahkan pada upaya-upaya mendukung lingkup tugas Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal dalam penyelenggaraan sebagian tugas pemerintahan di bidang urusan dalam negeri dan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih.

Renja Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Tegal Tahun 2015 diarahkan untuk melaksanakan penugasan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal pada Prioritas pembangunan daerah 2015 yang kelima yaitu Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal merupakan bagian integral dari Pemerintah Daerah Kota Tegal sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata



Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal. Oleh karena itu, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal berkewajiban menyusun Renja SKPD 2015 sebagai komponen pendukung RKPD Kota Tegal 2015.

Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal, menyatakan bahwa Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

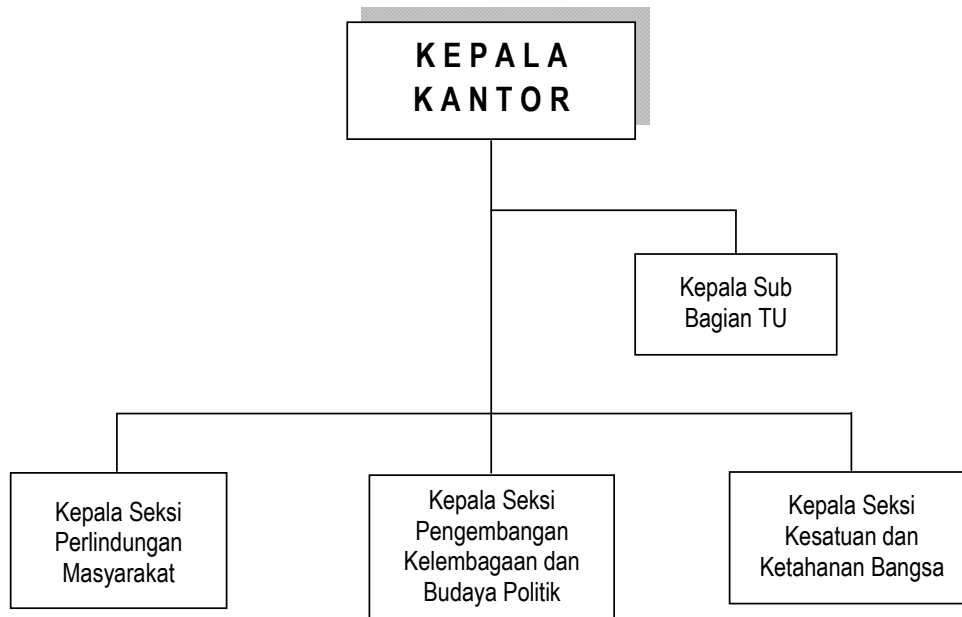
- Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ;
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ;
- Pengelolaan urusan tata usaha ;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

1. Kepala Kantor
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Kesatuan dan Ketahanan Bangsa
4. Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Budaya Politik
5. Seksi Perlindungan Masyarakat



Dengan struktur organisasi sebagaimana digambarkan dalam bagan dibawah ini :



1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam menyusun Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal Tahun 2015 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)



8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4592);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 971, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan



Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);
27. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tat Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kota Tegal;
28. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
30. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal tahun 2005-2025;
31. Surat Edaran Walikota Tegal Nomor 050/007 tanggal 20 Januari 2014 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Tegal Tahun 2014 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud Rencana Kerja (Renja) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal ini adalah untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan Kota Tegal tahun anggaran 2015 sesuai prioritas secara terarah dan terpadu, sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, serta isu-isu permasalahan yang perlu segera ditangani.



2. Tujuan

Tujuan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal ini adalah tersusunnya rencana kegiatan SKPD Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal secara tepat dan terarah pada tingkat kebijakan, program dan kegiatan serta rencana anggaran yang berbasis regulasi, tupoksi dan evaluasi.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA TEGAL TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal
- 2.4. Pembahasan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional/Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP



BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KOTA TEGAL TAHUN LALU****2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra**

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal merupakan salah satu instansi pada Pemerintah Daerah Kota Tegal, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 12 tahun 2008. Sesuai dengan **fungsi** dan **urusan** pemerintahan yang dilimpahkan pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal telah diselenggarakan belanja menurut urusan yaitu urusan wajib yang dirumuskan dalam bentuk program dan kegiatan yang merupakan implementasi dari kebijaksanaan dan kumpulan dari kegiatan nyata yang disusun secara sistematis untuk mencapai sasaran dan tujuan 5 (lima) tahun RPJMD.

Secara umum pencapaian kinerja kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Berikut capaian kinerja masing-masing kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal tahun 2013 :

1. Program Pelayanan administrasi perkantoran, terdiri atas kegiatan:

a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan jasa komunikasi dengan anggaran sebesar Rp. 6.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.812.463,- atau (keuangan 30,21% dan fisik 100%). pembayaran rekening telepon dibayar sesuai tagihan, sumberdaya air dan listrik ikut Sekretariat Daerah.

b. Kegiatan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi terhadap pembayaran pajak atas kendaraan dinas/operasional dengan anggaran sebesar Rp. 3.225.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.918.500,- atau (keuangan 90,50% dan fisik 100%) dibayar sesuai kebutuhan.



c. Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan jasa administrasi keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 44.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 40.075.000,- atau (keuangan 90,26% dan fisik 100%) hanya ada 3 PPTK

d. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan alat tulis kantor dengan anggaran sebesar Rp. 18.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 17.983.000,- atau (keuangan 99,91% dan fisik 100%).

e. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.997.500,- atau (keuangan 99,98% dan fisik 100%).

f. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yaitu 2 surat kabar/hari dengan anggaran sebesar Rp. 2.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.737.000,- atau (keuangan 86,85% dan fisik 100%) dibayar sesuai tagihan.

g. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman seperti makan minum rapat dengan anggaran sebesar Rp. 14.995.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 14.972.000,- atau (keuangan 99,85% dan fisik 100%).

h. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk memfasilitasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam maupun luar daerah dengan anggaran sebesar Rp. 90.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 74.723.921,- atau (keuangan 83,03% dan fisik 100%) dibayar sesuai kebutuhan.



2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pengadaan kendaraan dinas dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 185.890.000,- atau (keuangan 92,95% dan fisik 100%) sesuai penawaran.

b. Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor.

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pengadaan AC sebanyak 3 unit dengan anggaran sebesar Rp. 17.360.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 17.360.000,- atau (keuangan 100% dan fisik 100%).

c. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pembelian alat dan bahan pembersih dengan anggaran sebesar Rp. 1.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 998.000,- atau (keuangan 99,80 dan fisik 100%).

d. Kegiatan pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional.

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional berupa perbaikan dan pemeliharaan kendaraan dinas dengan anggaran sebesar Rp. 42.891.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 38.972.500,- atau (keuangan 90,86% dan fisik 100%) dibayar sesuai kebutuhan.

e. Kegiatan pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor.

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor seperti Komputer, Laptop dan printer dengan anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.650.000,- atau (keuangan 55% dan fisik 100%) dibayar sesuai kebutuhan.

3. Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan

a. Kegiatan penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pengamanan pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, pengamanan pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tegal dengan



anggaran sebesar Rp. 1.421.187.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 984.867.500,- atau (keuangan 69,30% dan fisik 100%) Pilkada hanya 1 putaran.

b. Kegiatan pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pelatihan pamswakarsa bagi anggota Linmas dan pengiriman Non PNS (anggota Linmas, tomas, toga, toda, LSM, dll) keluar daerah untuk berbagai kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 47.425.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 47.225.000,- atau (keuangan 99,58% dan fisik 100%).

c. Kegiatan pengendalian keamanan lingkungan

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pengamanan (PAM) parkir balaikota, Pam lebaran, PAM Natal, PAM Tahun Baru, PAM kunjungan pejabat negara, piket posko kantor, patroli wilayah, garnizun dan siskamtibmas (Polmas Jakwire) dengan anggaran sebesar Rp. 559.825.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 549.365.000,- atau (keuangan 99,13% dan fisik 100%).

4. Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

a. Kegiatan peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

Kegiatan ini terealisasi berupa Fasilitas terhadap kelembagaan dan kegiatan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) yang bertujuan untuk mengendalikan keamanan lingkungan di daerah sehingga terciptanya stabilitas dinamis dan situasi yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kegiatan pemantauan orang asing dan fasilitas kegiatan FKDM dengan anggaran sebesar Rp. 78.240.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 75.760.000,- atau (keuangan 96,83 % dan fisik 100%).

b. Kegiatan peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pemberian tali asih bagi linmas, pemberian uang duka bagi ahli waris linmas, pemberian bantuan pengobatan bagi linmas



dan pengadaan cetak KTA linmas dengan anggaran sebesar Rp. 89.895.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 62.322.500,- atau (keuangan 69,33% dan fisik 100%) uang duka, pengobatan linmas dan pembuatan KTA sesuai kebutuhan.

5. Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan

a. Kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk diskusi peningkatan kerukunan umat beragama bagi tokoh agama dengan anggaran sebesar Rp. 11.735.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 11.735.000,- atau (keuangan 100% dan fisik 100%).

b. Kegiatan peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk kemah pembauran bagi generasi muda (Pramuka) dengan anggaran sebesar Rp. 19.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 19.000.000,- atau (keuangan 100% dan fisik 100%).

c. Kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pelaksanaan Upacara HUT RI dan Paskibra, Upacara Harkitnas, Upacara Hari Jadi Provinsi, Upacara Hari Kesaktian Pancasila, Upacara Hari Pahlawan, dan Upacara Bulanan (tgl 17) dengan anggaran sebesar Rp. 230.544.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 223.475.700,- atau (keuangan 96,93% dan fisik 100%).

6. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

a. Kegiatan Seminar, talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk Seminar peningkatan wawasan kebangsaan dan bela negara bagi Pelajar dan Mahasiswa dengan anggaran sebesar Rp. 19.735.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 19.735.000,- atau (keuangan 100% dan fisik 100%).



7. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban Umum dan Keamanan

a. Kegiatan pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk Pengadaan pakaian dinas lapangan bagi anggota Hansip/Linmas sejumlah 1.200 orang, Gelar pasukan pengamanan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, dan Gelar pasukan pengamanan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tegal dengan anggaran sebesar Rp. 639.977.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 626.062.000,- atau (keuangan 97,83% dan fisik 100%) pengadaan PDL Linmas sesuai penawaran.

8. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

a. Kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) bagi Pelajar dan Masyarakat, serta kegiatan Razia pelajar melalui pembentukan tim pelaksana razia dan pembinaan pencegahan penyakit masyarakat bagi pelajar yang beranggotakan Polri, Dinas Pendidikan, Satpol PP dan Kesbangpolinmas dengan sasaran ke beberapa tempat seperti Mall, Warnet, PAI, GOR, Pantai Muarareja, dll. dengan anggaran sebesar Rp. 89.965.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 86.115.000,- atau (keuangan 95,72% dan fisik 100%).

9. Program Pendidikan Politik Masyarakat

a. Kegiatan penyuluhan kepada masyarakat

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk diskusi politik bagi Pelajar sebagai sarana pendidikan politik pemilih pemula, dan diskusi politik bagi masyarakat di 4 (empat) kecamatan se Kota Tegal dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik dikalangan pelajar yang sudah mempunyai hak pilih dan masyarakat. dengan anggaran sebesar Rp. 53.028.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 53.028.000,- atau (keuangan 100% dan fisik 100%).



b. Kegiatan koordinasi forum-forum diskusi politik

Bentuk kegiatannya adalah memfasilitasi bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Tegal hasil pemilu tahun 2009 , dengan anggaran sebesar Rp. 8.880.000,- dan terealisasi sebesar 8.880.000,- atau (keuangan 100% dan fisik 100%).

10. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

a. Kegiatan Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pelatihan kemampuan linmas dalam penyelamatan di air (SAR AIR) bekerjasama dengan Lanal Tegal, dengan anggaran sebesar Rp. 38.819.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 38.819.000,- atau (keuangan 100% dan fisik 100%).

Secara ringkas evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kesbangpol Kota Tegal sebagaimana terlihat pada lampiran Form I Renja.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal, maka penyelenggaraan fungsi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembangunan politik di daerah, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana di Kota Tegal dapat difasilitasi oleh salah satu lembaga teknis yang dibentuk yaitu Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

a. Kondisi saat ini

1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan

Kondisi masyarakat Kota Tegal yang heterogen sangat rentan sekali terhadap ancaman persatuan dan kesatuan dengan munculnya konflik-konflik sosial yang pada masa mendatang akan lebih kompleks dan multidimensi sehingga diperlukan upaya-upaya penanganan yang cepat dan tepat untuk mewujudkan situasi keamanan dan ketentraman masyarakat yang kondusif.

Kondusifitas dan stabilitas suatu daerah menjadi modal pokok keberhasilan pembangunan. Suatu hal yang mustahil, roda pembangunan dapat berjalan diatas kondisi daerah yang penuh gejolak dan konflik. Kantor Kesatuan, Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal sebagai salah satu komponen Pemerintah Daerah Kota Tegal berkewajiban untuk terus menjaga dan memelihara kondusifitas dan stabilitas daerah sehingga pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pembinaan persatuan dan kesatuan, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain :

- Pengamanan baik terbuka maupun tertutup agar tercipta situasi yang aman dan tertib serta terkendalinya gangguan Kamtrantibmas.
- Pelatihan peningkatan kapasitas anggota Linmas dalam pengendalian gangguan Kamtrantibmas, serta peningkatan kesejahteraan anggota Linmas.



- Pengembangan wawasan kebangsaan melalui kegiatan kemah pembauran, pelaksanaan upacara bendera hari-hari besar nasional, pendidikan pendahuluan bela negara dan pementapan wawasan kebangsaan.
- Pemberantasan penyakit masyarakat khususnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui kegiatan penyuluhan, test urine dan razia pelajar.

2. Pembangunan Politik Daerah

Salah satu prioritas pembangunan nasional adalah pembangunan bidang politik khususnya politik dalam negeri, dengan arah pada pembangunan sistem politik nasional yang demokratis serta penguatan dan kesatuan nasional.

Keberhasilan dalam proses pembangunan kelembagaan politik demokrasi menuntut tanggung jawab untuk memelihara proses pembangunan politik demokrasi agar tetap pada jalur dan arah yang benar sesuai dengan amanat konstitusi serta peningkatan kualitas praktek-praktek kelembagaan yang ada agar mampu memenuhi harapan masyarakat.

Salah satu unsur amat penting dalam pembangunan politik adalah pengembangan kehidupan demokrasi. Pengawasan yang aktif oleh rakyat dalam setiap proses politik termasuk pemilu, akan dapat menyehatkan berbagi penyimpangan yang telah lama terjadi dalam berbagai kegiatan politik di Indonesia, yang berupa proses seleksi kader yang tidak berdasarkan *merit system* dan diwarnai nepotisme serta kolusi, proses politik diwarnai *money politics*, dan produk-produk hukum yang diwarnai kepentingan kelompok dengan mengorbankan kepentingan nasional.

Penyelenggaraan fungsi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa serta pembangunan politik di daerah diperlukan adanya komunikasi dan koordinasi dengan *stakeholders* yang terdiri dari organisasi sosial politik dan kemasyarakatan, serta LSM guna mewujudkan situasi dan kondisi sosial politik yang lebih dinamis dan demokratis guna terciptanya situasi daerah yang kondusif.



Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pembangunan politik daerah, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain :

- Pendidikan politik kepada seluruh elemen masyarakat;
- Fasilitasi kegiatan partai politik melalui bantuan keuangan bagi partai politik yang mendapat kursi di DPRD.

3. Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana

Sesuai amanat mukadimah UUD 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa negara melindungi segenap tanah air dan tumpah darah Indonesia, pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Perlindungan terhadap bencana merupakan pelaksanaan mandate tersebut sekaligus pemenuhan hak asasi manusia Indonesia.

Dalam Dalam era desentralisasi dan otonomi daerah, penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan termasuk pelayanan public semakin didekatkan pada warga. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberi mandat oleh para pemilih di daerah, berkewajiban antara lain untuk menciptakan kesejahteraan dan memastikan perlindungan atas warganya.

Penanggulangan bencana merupakan salah satu perwujudan fungsi pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap rakyat. Agar dapat memberikan perlindungan yang optimal, pemerintah daerah perlu memiliki rencana penanggulangan bencana terstruktur, sistematis, dan dapat dilaksanakan dengan efektif. Penanggulangan bencana dianggap sebagai proses tidak terpisahkan antara sebelum bencana, pada saat bencana, dan setelah terjadinya bencana (Pasal 5 UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana).

Meningkatnya frekuensi kejadian berbagai jenis bencana alam diberbagai daerah menjadikan kita patut waspada. Bencana dapat menimbulkan korban jiwa, membawa kerugian material yang besar, menghancurkan hasil-hasil pembangunan, dan membuat miskin ratusan ribu bahkan jutaan orang dalam sekejap.



Ada beberapa strategi yang dapat diambil untuk mengurangi dampak kerugian bencana. Strategi pertama adalah dengan sama sekali menghilangkan atau secara signifikan mengurangi kemungkinan terjadinya bencana. Jika hal ini tidak dapat dilaksanakan, strategi berikutnya adalah mengurangi besarnya dampak dan keganasan bencana dengan mengubah karakteristik ancaman, meramalkan atau mendeteksi potensi bencana (system pencegahan dini), atau mengurangi kerentanan dengan memperbaiki unsur-unsur struktural dan non structural masyarakat. Bila bencana tidak dapat dihindarkan lagi, strategi terakhir adalah mempersiapkan pemerintah dan masyarakat untuk menghindari atau merespon bencana dengan tepat dan efektif sehingga kerugian dapat dikurangi. Strategi terakhir ini mencakup upaya meningkatkan kapasitas masyarakat untuk secepatnya memulihkan diri setelah terjadi bencana dan membangun kembali sembari menguatkan diri untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana di masa depan.

Jadi strategi penanggulangan bencana tidak terbatas pada tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana saja, tetapi juga meliputi upaya membangun ketangguhan masyarakat untuk menghadapi ancaman bahaya. Salah satunya adalah melalui pemberdayaan potensi Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas). Satuan Linmas perlu dibekali pengetahuan dan kemampuan serta mempunyai kepekaan, kesiagaan dan antisipasi dalam menghadapi segala potensi dan indikasi timbulnya bencana dan gangguan ketentraman serta ketertiban masyarakat.

Selain bertugas dalam pengamanan Pemilu di TPS, Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) juga ikut serta dalam melakukan segala usaha dan kegiatan untuk melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari bencana, kegiatan sosial kemasyarakatan, dan turut serta membantu menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan fungsi perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain :

- Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penanganan bencana.



- Pelatihan peningkatan kapasitas anggota Linmas dalam pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam khususnya bencana banjir.
- Fasilitasi pelaksanaan kegiatan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah).

b. Kondisi yang diharapkan

Melalui penyelenggara fungsi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembangunan politik di daerah. perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana di Kota Tegal, kondisi yang diharapkan kedepan oleh Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat antara lain :

1. Terpeliharanya stabilitas daerah
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam bela negara dengan menanamkan kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, memiliki sikap mental serta kesadaran menghayati dan mengamalkan Pancasila
3. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi hukum dan hak azasi manusia
4. Meningkatnya keterlibatan lembaga kemasyarakatan dalam menyelesaikan persoalan kemasyarakatan dan partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan public
5. Penguatan peran masyarakat dan partai politik dalam kehidupan politik
6. Terlaksananya agenda politik baik skala nasional maupun daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, aman, jujur, adil dan demokratis
7. Meningkatnya tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dini dan penanggulangan bencana.

Secara ringkas Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Kesbangpol Kota Tegal sebagaimana terlihat pada lampiran Form II Renja.



2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi SKPD

2.3.1 Terwujudnya aparat kamtrantibmas yang handal

Dilihat secara geografis Kota Tegal terletak di jalur utama di Pulau Jawa, sehingga dapat menjadi salah satu penyebab munculnya gangguan Kamtrantibmas. Dengan semakin meningkatnya jenis maupun jumlah kasus gangguan Kamtrantibmas, perlu diimbangi dengan jumlah aparat keamanan. Sampai dengan akhir tahun 2013, jumlah aparat kepolisian sebanyak 519 orang dan jumlah pos keamanan sebanyak 9 unit.

Dalam rangka terwujudnya aparat kamtrantibmas yang handal melalui kebijakan mengembangkan potensi Linmas melalui peningkatan kapasitas, kesejahteraan, serta sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dalam Renstra Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal dengan objek sasaran Anggota Linmas Kota Tegal, telah dilaksanakan beberapa program dan kegiatan, diantaranya yaitu pemberian santunan tali asih bagi anggota linmas lanjut usia, serta pembekalan / pelatihan bagi anggota Linmas Kelurahan se-Kota Tegal.

Pada tahun anggaran 2013, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal telah memberikan bantuan tali asih kepada 27 orang anggota Linmas usia lanjut yang mengabdikan dirinya kepada masyarakat. Artinya, selama periode Renstra 2009-2014, telah diberikan bantuan tali asih kepada 108 orang anggota Linmas atau 10.80 % dari total keseluruhan anggota Linmas. Sisanya akan diupayakan dalam periode mendatang.

Sedangkan terkait dengan peningkatan kemampuan kapasitas Anggota Linmas, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal memberikan pembekalan (pelatihan) kepada 100 orang anggota Linmas. Artinya, selama periode Renstra 2009-2014, telah terselesaikan pembekalan kepada 470 orang anggota Linmas atau sekitar 47 % dari total keseluruhan anggota Linmas. Sudah barang tentu sisanya akan terus diupayakan dalam periode mendatang.

Selain peningkatan kapasitas Satuan Linmas, upaya peningkatan keamanan dan ketentraman dalam masyarakat juga dilakukan dengan cara penguatan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) dan kemitraan polisi dengan masyarakat melalui kebijakan pengembangan potensi Linmas serta "Program Polisi Jakwire Wong Tegal".

Kondisi masyarakat Kota Tegal yang heterogen sangat rentan sekali terhadap ancaman persatuan dan kesatuan dengan munculnya konflik–konflik sosial yang pada masa mendatang akan lebih kompleks dan multidimensi sehingga diperlukan upaya – upaya penanganan yang cepat dan tepat untuk mewujudkan situasi keamanan dan ketentraman masyarakat yang kondusif.

2.3.2 Terpeliharanya stabilitas dan kondusifitas daerah

Kondisi masyarakat Kota Tegal yang heterogen sangat rentan sekali terhadap ancaman persatuan dan kesatuan dengan munculnya konflik–konflik sosial yang pada masa mendatang akan lebih kompleks dan multidimensi sehingga diperlukan upaya – upaya penanganan yang cepat dan tepat untuk mewujudkan situasi keamanan dan ketentraman masyarakat yang kondusif.

Kondusifitas dan stabilitas suatu daerah menjadi modal pokok keberhasilan pembangunan. Suatu hal yang mustahil, roda pembangunan dapat berjalan diatas kondisi daerah yang penuh gejolak dan konflik. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal sebagai salah satu komponen Pemerintah Daerah Kota Tegal berkewajiban untuk terus menjaga dan memelihara kondusifitas dan stabilitas daerah sehingga pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

Terjaga dan terpeliharanya stabilitas kondisi keamanan, ketertiban dan ketentraman di seluruh wilayah Kota Tegal merupakan hasil kerja keras semua aparat keamanan terkait dan dukungan seluruh komponen masyarakat. Namun demikian, kita harus terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah salah satu dari tujuan pembangunan itu sendiri, yaitu agar masyarakat merasa aman baik secara lahir maupun batin, bebas dari ketakutan dan ancaman dari luar serta bebas dari kecemasan akan segala gangguan termasuk bencana dengan segala akibatnya. Hal ini memerlukan dukungan personil aparat yang handal dan profesional.

Berbagai gangguan keamanan di wilayah Kota Tegal tersebut apabila tidak diimbangi dengan penuntasan penanganan oleh penegak hukum dapat melemahkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan secara keseluruhan.

Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Tegal dalam kurun waktu 6

(enam) tahun terakhir dapat dikatakan relatif stabil. Sampai dengan akhir tahun 2013, di Kota Tegal tidak terjadi kasus pertikaian antar warga baik yang berhubungan dengan masalah antar etnis, wilayah, suku, ras, maupun agama. Bila kita cermati Data Gangguan Kamtrantibmas di Kota Tegal seperti ditunjukkan dalam tabel dibawah, selama tahun 2013 praktis tidak ada konflik antar warga yang mengancam kamtrantibmas, hanya terjadi 2 kali pertikaian antar pelajar yang disebabkan oleh permasalahan pribadi antar pelajar dari SMK Negeri III dengan SUPM Negeri. Namun akhirnya, dengan mengatasnamakan wujud solidaritas dan kesetiakawan, pertikaian tersebut menjadi tawuran antar sekolah yang terjadi sampai 2 kali.

Terkait dengan aksi demonstrasi atau unjuk rasa, terjadi sedikit peningkatan jumlah unjuk rasa bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2012 terjadi 6 kali aksi unjuk rasa, sedangkan selama tahun 2013 telah terjadi 7 kali. Namun demikian, seluruh unjuk rasa yang terjadi selama ini berjalan dengan aman dan tertib, tanpa aksi anarkis. Isu-isu nasional seperti tuntutan pemberantasan korupsi, penolakan kenaikan harga BBM, evaluasi terhadap kinerja pemerintahan dibawah pasangan SBY-BOEDIONO, penolakan miss world, serta kerusuhan di negara-negara timur tengah masih menjadi topik utama dalam aksi unjuk rasa yang terjadi selama ini. Adapun aksi unjuk rasa terkait penolakan terhadap kebijakan pemerintah daerah selama ini belum pernah terjadi.

Selain itu, upaya lain dalam rangka kewaspadaan terhadap potensi gangguan ketentraman dan ketertiban yang mungkin muncul di masyarakat, kami juga melakukan pemantauan orang asing baik yang menetap maupun singgah sementara di hotel atau penginapan di Kota Tegal.

Keberadaan hotel/penginapan disamping menunjang kegiatan pariwisata di Kota Tegal juga dapat menjadi tempat rawan tindak kriminal yang perlu mendapat pengawasan seperti sebagai penginapan para teroris atau buronan, tempat mesum, perjudian, transaksi narkoba atau barang ilegal lainnya, serta berbagai bentuk penyakit masyarakat.

Oleh karenanya, upaya – upaya dalam meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat perlu untuk terus diagendakan yaitu melalui kegiatan Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan



Lingkungan; Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan; Pengendalian keamanan lingkungan, Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan; dan Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah;

2.3.3 Meningkatkan kerukunan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat

Salah satu upaya dalam rangka meningkatkan kerukunan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa adalah melalui peningkatan dan pengembangan wawasan kebangsaan. Kegiatan kemah pembauran, peringatan hari besar nasional melalui pelaksanaan upacara bendera, dan pendidikan pendahuluan bela negara (PPBN) merupakan wujud langkah yang ditempuh guna pengembangan wawasan kebangsaan.

Pemantapan wawasan kebangsaan diharapkan dapat memberikan arah bagi perwujudan jati diri bangsa yang sesuai dengan nilai – nilai luhur budaya bangsa ditengah perkembangan kehidupan kemasyarakatan yang sangat cepat sebagai akibat dari globalisasi dan modernisasi. Di samping itu, pemantapan wawasan kebangsaan dimaksudkan untuk menciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai – nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan selektif.

Berkembangnya sistem informasi dan teknologi yang semakin terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat mengancam keberadaan dan pelestarian nilai-nilai budaya yang ada. Selain itu generasi muda belum sepenuhnya terdorong untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan dan pelestarian budaya. Selain teknologi informasi yang berkembang pesat, faktor pelibatan masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya yang kurang optimal serta sosialisasi nilai-nilai budaya kepada masyarakat luas yang belum sepenuhnya dilakukan menjadikan upaya pelestarian ini mengalami hambatan.

Keanekaragaman budaya Kota Tegal menuntut pemerintah daerah semakin peka terhadap perubahan global dan melakukan upaya yang serius dalam penanganan budaya. Identifikasi potensi budaya menjadi langkah untuk mewujudkan pelestarian nilai budaya yang berpihak pada kepentingan penyelamatan nilai-nilai luhur yang telah ada sejak dahulu kala.



Pada tahun 2013, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal telah menyelenggarakan beberapa kegiatan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam rangka meningkatkan kerukunan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat yaitu antara lain :

- Diskusi peningkatan kerukunan umat beragama yang telah diikuti oleh 100 orang perwakilan tokoh agama, tokoh etnis, tokoh adat, dan tokoh masyarakat.
- Kemah pembauran yang telah diikuti oleh 100 orang perwakilan pelajar dari berbagai unsur agama, etnis, dan ras.
- Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara yang telah diikuti oleh 200 orang pelajar se-Kota Tegal.
- Pelaksanaan upacara peringatan hari-hari besar nasional dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat sebagai pesertanya.

Mengingat sangat pentingnya arti kerukunan, persatuan dan kesatuan, perlu terus diagendakan kegiatan-kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan dalam rangka kokohnya persatuan dan kesatuan, seperti Kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama; peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat; Kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa; serta Kegiatan seminar, talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan.

2.3.4 Terwujudnya proses politik yang semakin demokratis

Tingkat partisipasi masyarakat Kota Tegal dalam pelaksanaan proses demokrasi terlihat tampak terjadi peningkatan dari Pemilihan Umum Gubernur tahun 2008 sampai dengan Pemilihan Umum Presiden tahun 2009. Akan tetapi terjadi penurunan yang cukup fantastis pada Pemilihan Umum Gubernur tahun 2013 dan Pemilihan Umum Walikota tahun 2013 yang lalu. Apalagi jika dibandingkan pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2004.

Pada Pemilihan Umum tahun 2004 yang diikuti oleh 24 partai politik, dari 171.865 jiwa yang tercatat sebagai pemilih, hanya 129.141 jiwa atau sekitar 75,14 % yang menggunakan hak pilihnya. Penurunan tingkat partisipasi masyarakat ini tidak terjadi hanya di Kota Tegal saja, akan tetapi terjadi juga di daerah-daerah lain secara nasional.



Turunnya partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia terjadi sejak diberlakukannya otonomi daerah. Pada awalnya, partisipasi pemilih masih mencapai 70%. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, partisipasi tersebut turun hanya berkisar rata-rata 60% di semua daerah.

Penurunan tersebut diperkirakan karena beberapa faktor, antara lain adanya kejenuhan dari masyarakat terhadap banyaknya pemilu, kurangnya sosialisasi tentang pemilu, pendidikan politik di masyarakat yang belum efektif, serta sikap apatis masyarakat yang sudah tidak percaya terhadap para calon.

Untuk itu, kesadaran politik masyarakat masih perlu mendapatkan perhatian terutama menyangkut hak dan kewajiban warga negara serta kelembagaan partai politik. Peningkatan hak dan kewajiban warga negara antara lain dilaksanakan melalui orientasi kesadaran bela negara dan pengembangan wawasan kebangsaan bagi tokoh masyarakat, pemuda, pramuka dan organisasi massa.

Upaya yang juga dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam bidang politik yaitu melalui pelaksanaan Kegiatan koordinasi forum-forum diskusi politik dan Penyuluhan kepada masyarakat (pendidikan politik). Kegiatan ini merupakan penyuluhan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang baru di bidang politik. Kegiatan tersebut diadakan di tiap-tiap kecamatan dan diikuti oleh 100 orang dari perwakilan para tokoh masyarakat atau orang yang berpengaruh di masyarakatnya.

Namun karena keterbatasan sumber dana, untuk kurun waktu 5 tahun (2010 – 2014) jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan / sosialisasi direncanakan hanya 2.000 orang (400 orang per tahun) atau sekitar 1.00 % dari total 200.468 orang yang memiliki hak pilih di Kota Tegal.

Pada tahun 2013, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal telah memberikan pendidikan politik kepada 500 orang. Artinya, selama periode Renstra 2009-2014, telah terealisasi 0,90 % dari total 200.468 orang yang memiliki hak pilih. Sudah barang tentu sisanya akan terus diupayakan dalam periode tahun-tahun mendatang.



2.3.5 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana

Kondisi topografis Kota Tegal yang terletak di wilayah pantai dengan rata-rata ketinggian kurang dari 3 meter di atas permukaan laut (DPL), serta dengan kepadatan pemukiman yang cukup tinggi, menjadikan Kota Tegal rawan terhadap bencana alam terutama banjir, abrasi di kawasan pantai, naiknya permukaan air laut atau yang biasa disebut Rob, serta bencana kebakaran dan kekeringan.

Panjang pantai Kota Tegal kurang lebih 7 Km yang terbentang dari Kelurahan Panggung, Mintaragen, Tegalsari dan Muarareja. Abrasi di pantai Kota Tegal terjadi sejak tahun 1980-an. Luasan daerah yang terabrasi adalah 48,03 ha. Penyebab terjadinya abrasi di Kota Tegal adalah alam dan manusia. Penyebab alam berupa arus/arah angin dan gelombang, sedangkan penyebab dari manusia adalah rusaknya hutan bakau akibat pembabatan liar. Penebangan hutan bakau dilakukan dengan dalih untuk meningkatkan perekonomian. Kayu bakau digunakan untuk arang yang mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi.

Sehubungan dengan kondisi geografi Kota Tegal yang relatif datar dari permukaan air laut, maka kondisi saluran drainase kota dan saluran drainase lingkungan memiliki beda tinggi yang kecil (hampir datar) sehingga cepat mengalami pendangkalan apabila terjadi sedimentasi. Maka hal ini perlu secara rutin dipelihara sehingga saluran tersebut tidak terjadi pendangkalan, agar aliran air menjadi tetap lancar, guna mengantisipasi terjadi genangan di musim hujan.

Wilayah Kota Tegal dilalui oleh 5 (lima) sungai yaitu Sungai Kemiri, Sungai Gung, Sungai Sibelis, Sungai Kali Gangsa, dan Sungai Ketiwon. Pada umumnya, sungai tersebut telah mengalami pendangkalan yang disebabkan oleh sedimentasi, tumbuhnya tanaman keras di bantaran sungai, serta perilaku negatif masyarakat seperti membuang sampah pada saluran air. Kondisi tersebut menjadikan Kota Tegal merupakan wilayah rawan terhadap bencana banjir. Ancaman banjir di Kota Tegal selain akibat curah hujan tinggi, juga ancaman kiriman air dari arah selatan Kota Tegal melalui aliran sungai yang kondisi tanggulnya memang sudah kritis.

Patut kita syukuri bahwa selama tahun 2013 di Kota Tegal tidak terjadi bencana alam yang bersifat nasional, hanya beberapa kali terjadi genangan air akibat naiknya air laut (rob) di beberapa wilayah di Kelurahan Mintaragen dan Panggung Kecamatan Tegal



Timur serta Kelurahan Tegalsari dan Muarareja Kecamatan Tegal Barat. Hal ini terjadi hampir setiap tahun dan pada lokasi yang sama sehingga perlu penanganan serius dan dukungan baik infrastruktur maupun SDM.

Masih terbatasnya tingkat kemampuan dan profesionalisme aparat perlindungan masyarakat (Linmas) akan sangat mempengaruhi kinerja pelayanan yang diemban. Untuk itu, perlu peningkatan kapasitas aparat dan sarana pendukung dalam penanggulangan dan penanganan bencana.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparat perlindungan masyarakat (Linmas) khususnya dalam penanggulangan dan penanganan bencana yaitu melalui pelaksanaan Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam. Kegiatan ini merupakan pelatihan bagi 81 orang anggota Linmas dalam menangani dan menanggulangi bencana. Pelatihan difokuskan pada SAR (search and rescue) korban bencana alam khususnya bencana banjir, dengan materi antara lain :

- Pengenalan organisasi SAR
- Teori dan praktek mendayung
- Pengenalan dan pengoperasian perahu karet dan mesin tempel
- Teori dan praktek berenang dan penyelaman dasar
- Pertolongan pertama pada korban tenggelam
- Teknik evakuasi korban bencana
- Survival

Namun karena keterbatasan sumber dana, untuk kurun waktu 5 tahun (2010 – 2014) jumlah aparat perlindungan masyarakat (Linmas) yang memperoleh pelatihan direncanakan hanya 405 orang (81 orang per tahun) atau sekitar 40.50 % dari total 1000 orang anggota Satuan Linmas (Perlindungan Masyarakat). Pada tahun 2013, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat telah memberikan pelatihan penanganan dan penanggulangan bencana (SAR) kepada 81 orang anggota satuan Linmas. Artinya, selama periode Renstra 2009 – 2014 telah tercapai 32.40 %. Sisanya akan terus diupayakan dalam periode tahun – tahun mendatang.



2.3.6 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba

Penyakit masyarakat merupakan tindakan yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan dan melanggar atau menyimpang dari ketentuan hukum, agama, adat dan tata krama yang diimplementasikan dalam bentuk perjudian, minuman keras, penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta segala bentuk penyiaran / penayangan pornografi dan pornoaksi. Letak Kota Tegal sebagai kota transit yang menghubungkan kota-kota besar di pulau Jawa menjadikan Kota Tegal rawan terhadap penyakit masyarakat khususnya peredaran Narkoba.

Masalah penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai NARKOBA (Narkotika dan Bahan/Obat berbahaya) merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Meskipun dalam Kedokteran, sebagian besar golongan Narkoba masih bermanfaat bagi pengobatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan tidak menurut indikasi medis atau standar pengobatan, terlebih lagi bila disertai peredaran di jalur ilegal, akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas khususnya generasi muda.

Data penyalahgunaan narkoba di Kota Tegal dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan. Pada tahun 2013, terdapat 13 kasus penyalahgunaan narkoba dengan 17 tersangka. Bila dibandingkan dengan tahun 2012, terjadi penurunan sebesar 27.78 %.

Meskipun data penyalahgunaan narkoba di Kota Tegal menunjukkan adanya penurunan, peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan fenomena gunung es. Bisa saja jumlah penyalahgunaan yang ada sebenarnya, jauh lebih banyak dari data-data hasil penangkapan barang bukti narkoba, karena pemakai ataupun pengedar tidak mungkin melaporkan ke pihak yang berwenang. Untuk itu, perlu dilakukan upaya-upaya yang secara intensif dan konsisten dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat.



Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan melalui

beberapa cara, antara lain sebagai berikut :

- a. Preventif (pencegahan), yaitu untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkoba. Pencegahan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pembinaan dan pengawasan dalam keluarga, penyuluhan oleh pihak yang kompeten, pengajian oleh para ulama, pengawasan tempat-tempat hiburan, pengawasan obat-obatan ilegal dan melakukan tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk mengurangi atau meniadakan kesempatan terjadinya penyalahgunaan Narkoba.
- b. Represif (penindakan), yaitu menindak dan memberantas penyalahgunaan narkoba melalui jalur hukum, yang dilakukan oleh para penegak hukum atau aparat kemananan yang dibantu oleh masyarakat.
- c. Kuratif (pengobatan), bertujuan penyembuhan para korban baik secara medis maupun dengan media lain.
- d. Rehabilitatif (rehabilitasi), dilakukan agar setelah pengobatan selesai para korban tidak kambuh kembali "ketagihan" Narkoba. Rehabilitasi berupaya menyantuni dan memperlakukan secara wajar para korban narkoba agar dapat kembali ke masyarakat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Selama tahun 2013, telah dilakukan beberapa kegiatan sebagai upaya preventif dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba, yaitu :

1. Penyuluhan P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) kepada 200 orang pelajar dan 200 orang tokoh pemuda, mahasiswa, ormas, dan OKP.
2. Test urine yang dilaksanakan secara mendadak di beberapa tempat hiburan malam.
3. Razia pelajar sebanyak 12 kegiatan dengan target lokasi tempat nongkrong para pelajar pada jam-jam sekolah, seperti mall, objek wisata PAI, warnet dan tempat bermain game online. Dari razia tersebut terjaring sebanyak 163 pelajar yang berasal dari sekolah-sekolah yang ada di Kota Tegal maupun luar Kota Tegal. Jumlah pelajar Kota Tegal mendominasi sebanyak 103 orang, diikuti pelajar Kabupaten Tegal sebanyak 39 orang, kemudian Kabupaten Brebes sebanyak 19 pelajar dan Kabupaten Pemalang sebanyak 2 orang.



2.3.7 Tumbuhnya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat menjaga stabilitas politik dalam kehidupan berpolitik

Tahun 2013 dan 2014 disebut sebagai tahun politik di Kota Tegal karena dalam kurun waktu 2 tahun, digelar 4 kali Pemilihan Umum (Pemilu). Dimulai pada tanggal 26 Mei 2013, telah dilaksanakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Beberapa bulan kemudian tepatnya pada tanggal 27 Oktober 2013 telah dilaksanakan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota. Pada tanggal 9 April 2014 mendatang akan dilaksanakan Pemilu Legislatif yang akan dilanjutkan dengan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada Juli 2014.

Dalam penyelenggaraan pemilu sangat berpotensi terjadinya konflik sosial maupun konflik hukum, yang dapat memicu tindakan-tindakan anarki dari masyarakat yang dapat mengganggu kondusifitas daerah. Konflik tersebut dapat disebabkan karena adanya berbagai pelanggaran, mulai dari kode etik oleh penyelenggara pemilu, administrasi, atau pun dugaan tindak pidana pemilu yang berakhir pada sengketa. Bahkan tidak jarang konflik tersebut meluas hingga pada konflik sosial masyarakat. Potensi-potensi konflik tersebut harus diidentifikasi sejak dini agar bisa meminimalisir terjadinya konflik secara hukum atau pun konflik sosial yang lebih besar.

Kita patut bersyukur, pada 2 (dua) agenda politik yang telah dilaksanakan di Kota Tegal selama tahun 2013 yaitu Pemilu Gubernur dan Pemilu Walikota, tidak terjadi konflik yang memicu tindakan-tindakan anarki dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas daerah. Kondisi daerah Kota Tegal baik pra, saat pemilu, maupun pasca pemilu Gubernur dan pemilu Walikota, relatif stabil dan kondusif. Mudah-mudahan kondisi ini terus berjalan sampai dengan agenda politik mendatang pada tahun 2014 yaitu pemilu Legislatif dan pemilu Presiden.

Kondisi diatas mencerminkan meningkatnya kedewasaan berpolitik masyarakat, sekaligus menjadi modal dalam pelaksanaan agenda politik di tahun – tahun mendatang. Namun, dalam upaya mewujudkan partai politik yang aspiratif dan menjunjung tinggi demokrasi serta sebagai upaya cegah dini dan deteksi dini terhadap kerawanan-kerawanan yang mungkin ditimbulkan dari proses demokrasi, maka perlu adanya fasilitasi dan pembinaan kegiatan partai politik sehingga stabilitas daerah dapat terus terjaga.



Selain itu, perlu juga adanya optimalisasi fungsi-fungsi Kominda (Komunitas Inteljen Daerah), FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat), dan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) dalam rangka upaya cegah dini dan deteksi dini terhadap kerawanan-kerawanan.

2.4 Pembahasan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (Renja) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal tahun 2015 merupakan lanjutan dari beberapa program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada sebelumnya sebagian besar masih dilaksanakan pada tahun 2015. Pada prinsipnya program dan kegiatan tersebut merupakan bagian program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal tahun 2009-2014 dan merupakan program dan kegiatan yang telah disusun berdasarkan skala prioritas kecuali pagu indikatif yang ditetapkan.

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal dalam penyusunan program dan kegiatan terlebih dahulu menampung aspirasi masyarakat dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD terkait yang langsung ditujukan kepada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal, dan juga hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbangcam

Berdasarkan hasil rumusan aspirasi dari para pemangku kepentingan tersebut dilakukan penyesuaian dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD sekaligus merupakan program dan kegiatan yang merupakan bagian dari isu-isu strategis dari SKPD.

Secara ringkas Pembahasan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat sebagaimana terlihat pada lampiran Form III Renja dan Form IV Renja.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional/Provinsi

Adapun Kebijakan dalam Rencana Kerja pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal berdasarkan antara lain sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 27 tahun 2013 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2014.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Pasal 48), mengharapkan bahwa hasil Evaluasi RPJM menjadi bahan bagi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah untuk priode berikutnya.
3. Sesuai dengan Pasal 28 dan 29 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perlu dilakukan evaluasi atas Pelaksanaan rencana dalam pembangunan dalam upaya mencari kesinambungan pembangunan didaerah dan menjaga keterpaduan antara pemerintah dan pemerintah daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal

Visi adalah suatu gambaran keadaan masa depan yang diinginkan Pemerintah Kota Tegal dalam jangka panjang.

Mengacu pada konsepsi Visi Kepala Daerah Terpilih adalah :

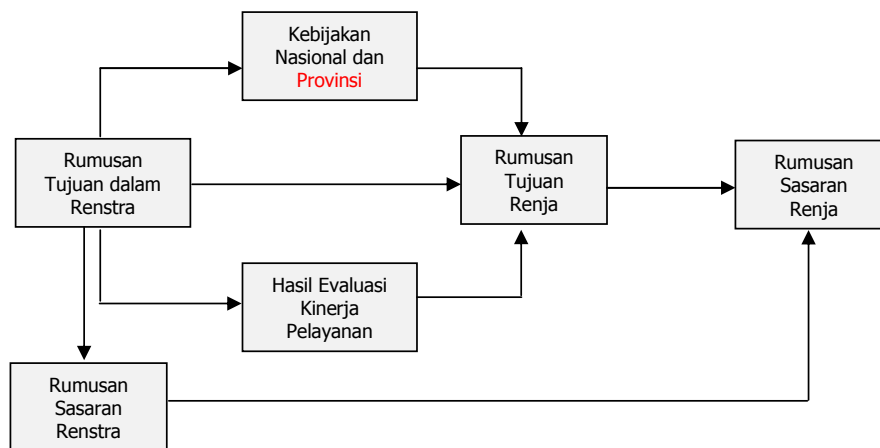
**“TERWUJUDNYA KOTA TEGAL YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT
BERBASIS PELAYANAN PRIMA”**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa



perencanaan pembangunan pada Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal memuat hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tegal Tahun 2005-2025, khususnya tahapan ketiga Tahun 2014-2019.

Perumusan tujuan dan sasaran Renja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal disusun dengan mempedomani rumusan tujuan Renja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal, sebagaimana dilustrasikan sebagai berikut :



Adapun hasil rumusan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan misi di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal adalah :

1. Tujuan

Tujuan yang akan ditempuh pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kemampuan dan kompetensi aparatur melalui pendidikan, pelatihan, dan peningkatan sarana prasarana
- b. Meningkatkan kapasitas anggota perlindungan masyarakat (Linmas)
- c. Menciptakan stabilitas daerah melalui persatuan dan kesatuan serta kerukunan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat



- d. Menumbuhkembangkan kepedulian masyarakat dalam penanggulangan bencana serta mencegah timbulnya konflik sosial melalui pemberantasan penyakit masyarakat
- e. Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam proses politik yang berlandaskan etika dan moral yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan
- f. Memperkuat kelembagaan partai politik sebagai sarana pendidikan politik masyarakat

2. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kompetensi pegawai di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat
- b. Terwujudnya aparat kamtrantibmas yang handal
- c. Terpeliharanya stabilitas dan kondusifitas daerah
- d. Meningkatnya kerukunan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat
- e. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana
- f. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
- g. Terwujudnya proses politik yang semakin demokratis
- h. Tumbuhnya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat menjaga stabilitas politik dalam kehidupan berpolitik
- i. Terwujudnya pendidikan politik yang baik dan kontinyu bagi masyarakat

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran maka disusunlah rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 sebagai wujud untuk menentukan tindakan prioritas. Program adalah rangkaian kegiatan utama yang dipaket berdasarkan kebijakan yang telah diputuskan dan dipilih yang dilengkapi dengan target dan sasaran yang jelas. Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.



Adapun program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun

2015, yaitu sebagai berikut :

1. Program

- a. Program pelayanan administrasi perkantoran ;
- b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur ;
- c. Program peningkatan disiplin aparatur ;
- d. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan ;
- e. Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal ;
- f. Program pengembangan wawasan kebangsaan ;
- g. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan ;
- h. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat ;
- i. Program pendidikan politik masyarakat ;
- j. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.

2. Kegiatan

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- d. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- g. Penyediaan Makanan dan Minuman
- h. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- i. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
- j. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
- k. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
- l. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
- m. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
- n. Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- o. Pengendalian Keamanan Lingkungan



-
- p. Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
 - q. Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
 - r. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
 - s. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat
 - t. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
 - u. Seminar, talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan
 - v. Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba
 - w. Penyuluhan kepada masyarakat
 - x. Koordinasi forum-forum diskusi politik
 - y. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam.

Secara ringkas program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2015 sebagaimana terlihat pada lampiran Form V Renja

BAB IV

PENUTUP

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal sebagai bagian integral dari Pemerintah Daerah Kota Tegal berkewajiban menyusun Renja SKPD 2015 sebagai komponen pendukung RKPD Kota Tegal 2015. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal mempunyai kewajiban untuk terus menjaga dan memelihara kondusifitas dan stabilitas daerah sehingga pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan perencanaan. Suatu hal yang mustahil, roda pembangunan dapat berjalan diatas kondisi daerah yang penuh gejolak dan konflik.

Oleh karena itu, perlu perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2015 sehingga mampu menjawab tantangan, permasalahan dan isu-isu strategis yang perlu segera ditangani. Melalui Rencana Kerja (Renja) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal ini, dapat memberikan arah dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan Kota Tegal tahun anggaran 2015 sesuai prioritas secara terarah dan terpadu, sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal.

Kami menyadari dalam menyusun rencana kerja ini masih terdapat kekurangan dari semua sisi. Untuk itu demi penyempurnaan dalam menyusun rencana kerja pada tahun depan, kami mohon akan saran dan kritikan sehingga terwujudnya dan tercapainya visi dan misi Pemerintah Kota Tegal dan khususnya Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Tegal, Maret 2014

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA,
POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KOTATEGAL

Drs. SURIPTO
Pembina Tingkat I
NIP. 19590410 198703 1 005

Kode	1		2	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan 2010 - 2012	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013			Target dan Pekiraan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014		
						Target Renja SKPD	Realisasi Renja SKPD	Tingkat Capaian Realisasi (%)	Target Renja SKPD	Pekiraan Realisasi Renja SKPD	Tingkat Capaian Realisasi (%)
	19	01	17	3	4	5	6	7	8	9	10
	1										
	19	01	17	PROGRAM Pengembangan Wawasan Kebangsaan	tercapai	tercapai	tercapai	100,00	tercapai	tercapai	100,00
1	19	01	17	KEGIATAN Penyikatan Tolerasi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	300 org	100 org	100 org	100,00	100 org	100 org	100,00
1	19	01	17	KEGIATAN Penyikatan Pasa Soliditas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat	300 org	100 org	100 org	100,00	100 org	100 org	100,00
1	19	01	17	KEGIATAN Penyikatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa							
				a. Anggota Pasukiba yang berlatih	246 org	82 org	82 org	100,00	82 org	82 org	100,00
				b. Jumlah upacara peringatan hari besar nasional yang diselenggarakan	39 kgt	13 kgt	13 kgt	100,00	13 kgt	13 kgt	100,00
				Pengalasan ketahanan bangsa dan bela negara	tercapai	tercapai	tercapai	100,00	tercapai	tercapai	100,00
1	19	01	18	PROGRAM Kemahiran Pengembangan Wawasan Kebangsaan							
1	19	01	18	KEGIATAN Seminar, Talk Show, Diskusi Wawasan kebangsaan	5,570 org	200 org	200 org	100,00	200 org	200 org	100,00
1	19	01	19	PROGRAM Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mengingat Kelembutan dan Keamanan							
1	19	01	19	KEGIATAN Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	0 kgt	2 kgt	2 kgt	100,00	1 kgt	1 kgt	100,00
				a. Jumlah aparat yang mengikuti giat pasukan pengamanan Pemilu Gubernur	x	1,200 kgt	1,184 org	98,67			
				b. Jumlah aparat yang mengikuti giat pasukan pengamanan Pemilu Walikota	x	1,200 org	1,159 org	96,58			
				c. Jumlah aparat yang mengikuti giat pasukan pengamanan Pemilu Legislatif & Presiden	x						
1	19	01	20	PROGRAM Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	63 kasus	18 kasus	13 kasus	72,22	13 kasus	10 kasus	76,92
1	19	01	20	KEGIATAN Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	24 kgt (th. 2010)	12 kgt	12 kgt	100,00	12 kgt	12 kgt	100,00
				Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan P4GN	410 org (th. 2010)	400 org	400 org	100,00	400 org	400 org	100,00
1	19	01	21	PROGRAM Pendidikan Politik Masyarakat	0%	70 %	57,28 %	81,83	60 %	60 %	100,00
1	19	01	21	KEGIATAN Penyuluhan Kepada Masyarakat	a. Jumlah pelajar yang mengikuti pendidikan politik pemilu	100 org (th. 2012)	100 org	100,00	100 org	100 org	100,00
				b. Jumlah masy. yang mengikuti pendidikan politik	1,200 org	400 org	400 org	100,00	400 org	400 org	100,00
1	19	01	21	KEGIATAN Koordinasi forum-forum diskusi politik	Dokumen laporan penggunaan bantuan keuangan perpod sesuai peraturan perundang-undangan	8 dokumen	8 dokumen	100,00	8 dokumen	8 dokumen	100,00
1	19	01	22	PROGRAM Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Kesiapan tenaga relawan siaga bencana	243 org	81 org	81 org	100,00	80 org	100,00
1	19	01	22	KEGIATAN Pemantaban dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan SAR	243 org	81 org	100,00	80 org	80 org	100,00
1	19	01	01	PROGRAM Pelayanan administrasi perkantoran	lemb administrasi keuangan dan kegiatan	36 bulan	12 bh	12 bh	100,00	12 bh	100,00
1	19	01	01	KEGIATAN Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Jumlah rekening telepon yang pagharganya terbayar	36 bulan	12 bh	100,00	12 bh	12 bh	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan 2010 - 2012	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013				Target dan Pekiraan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014				
							Target Renja SKPD		Realisasi Renja SKPD		Tingkat Capaian Realisasi (%)	Target Renja SKPD	Pekiraan Realisasi Renja SKPD		Tingkat Capaian Realisasi (%)
	1	2	3	4			5	6	7	8	9	10			
1	19	01	01	02	KEGIATAN Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang pajaknya terbayar	x	13	unit	13	unit	13	unit	100.00	
1	19	01	01	07	KEGIATAN Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honor PA, PPK, bendahara & pengurus barang	36 bulan	12	bn	12	bn	12	bn	100.00	
1	19	01	01	10	KEGIATAN Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	36 bulan	12	bn	12	bn	100.00	12	bn	100.00
1	19	01	01	11	KEGIATAN Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah blangko cetakan dan fotokopi yang tersedia	36 bulan	12	bn	12	bn	100.00	12	bn	100.00
1	19	01	01	15	KEGIATAN Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang tersedia	6 surat kabar/hr	2	surat kabar/hr	2	surat kabar/hr	2	surat kabar/hr	100.00	
1	19	01	01	17	KEGIATAN Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman penunjang rapat	36 bulan	12	bn	12	bn	100.00	12	bn	100.00
1	19	01	01	18	KEGIATAN Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terbayarnya biaya perjalanan dinas PNS ke luar daerah	36 bulan	12	bn	12	bn	100.00	12	bn	100.00
1	19	01	02		PROGRAM Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kelancaran tugas dan koordinasi	36 bulan	12	bn	12	bn	100.00	12	bn	100.00
1	19	01	02	22	KEGIATAN Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Jumlah alat & bahan pembersih kantor yang tersedia	36 bulan	12	bn	12	bn	100.00	12	bn	100.00
1	19	01	02	24	KEGIATAN Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas dan operasional yang terpelihara	12 unit	4	unit	4	unit	100.00	4	unit	100.00
1	19	01	02	28	KEGIATAN Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor	Jumlah komputer dan printer yang terpelihara	12 unit	5	unit	5	unit	100.00	5	unit	100.00
1	19	01	02	05	KEGIATAN Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Tersedanya 1 unit kendaraan dinas kepala SKPD	x	1	unit	1	unit	100.00			
1	19	01	02	07	KEGIATAN Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedanya 3 unit AC	x	3	unit	3	unit	100.00			
1	19	01	06		PROGRAM Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terdukungnya kinerja SKPD							5	bn	100.00
1	19	01	06	05	KEGIATAN Penyusunan Renstra SKPD	Tersusunnya rencana strategis (Renstra) SKPD							1	Dokumen	100.00

Tegal, Maret 2014
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KOTA TEGAL

Drs. SUPRTO
Pembina Tingkat I
NIP. 19590410 198703 1 005

FORM II RENJA

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
KOTA TEGAL

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) : Kantor Kesbangpol dan Limmas Kota Tegal

No.	Indikator	SPM/standar nasional*)	IKK	Target Renstra SKPD			Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Cakupan Pelugas Limmas	100%	2 orang per TPS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Kegiatan pembinaan politik daerah		Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah	4 kgt	4 kgt	4 kgt	4 kgt	4 kgt	4 kgt	4 kgt
3.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas & OKP		Menunjukkan jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas & OKP	0 kgt	1 kgt	1 kgt	0 kgt	1 kgt	1 kgt	1 kgt

Tegal, Maret 2014

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA
POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KOTA TEGAL

Drs. SURIPTO
Pembina Tingkat I
NIP. 19590410 198703 1 005

Catatan Analisis
12
• 2 orang per TPS - Permendagri No. 62 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kab/Kota • dilaksanakan di 4 (empat) kecamatan • Kegiatan Penyuluhan P4GN

FORM III RENJA

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2014
Kota Tegal
(Hasil Musrenbangcam)

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) : Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Tegal

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume
	2			4

Tegal, Maret 2014

**KEPALA KANTOR KESATUAN BANGS,
POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARA
KOTA TEGAL**

Drs. SURIPTO
Pembina Tingkat I
NIP. 19590410 198703 1 005

Catatan
5

A
KAT

FORM IV RENJA

Prioritisasi Kegiatan Berdasar Kriteria

No.	Kegiatan	Kriteria										Status U Urg
		Kontribusi pada Pencapaian Target Prioritas Pembangunan		SPM/IKK		Kesesuaian dengan Renja SKPD		Dukungan pada pemenuhan hak dasar rakyat Lintas Kecamatan		Dukungan nilai tambah Lintas Kecamatan		
		15	Kriteria I	20	Kriteria II	20	Kriteria III	20	Kriteria IV	10	Kriteria V	
1	2		3		4		5		6		7	
1.	Program pendidikan politik masyarakat Kegiatan penyuluhan kepada masyarakat	75	5	80	4	100	5	100	5	50	5	40
2.	Kegiatan koordinasi forum- forum diskusi politik	75	5	60	3	100	5	80	4	40	4	40
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan											
3.	Kegiatan pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	75	5	80	4	100	5	100	5	50	5	40
4.	Kegiatan pengendalian keamanan lingkungan	75	5	80	4	100	5	100	5	50	5	50
	Program pemeliharaan Kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal											
5.	Kegiatan peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	75	5	80	4	80	4	100	5	50	5	40
6.	Kegiatan peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	75	5	80	4	100	5	100	5	50	5	50
	Program pengembangan wawasan kebangsaan											
7.	Kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	75	5	80	4	80	4	80	4	40	4	40
8.	Kegiatan peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat	60	4	80	4	80	4	80	4	40	4	30

No.	Kegiatan	Kriteria										Status Urg
		Kontribusi pada Pencapaian Target Prioritas Pembangunan		SPM/IKK		Kesesuaian dengan Renja SKPD		Dukungan pada pemenuhan hak dasar rakyat Lintas Kecamatan		Dukungan nilai tambah Lintas Kecamatan		
		15	Kriteria I	20	Kriteria II	20	Kriteria III	20	Kriteria IV	10	Kriteria V	
1	2		3		4		5		6		7	10
9.	Kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	75	5	80	4	100	5	80	4	40	4	50
12.	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Kegiatan seminar, talk show, diskusi wawasan kebangsaan	75	5	60	3	100	5	100	5	50	5	40
13.	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat Kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan miras dan narkoba	75	5	80	4	100	5	80	4	40	4	40
13.	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Kegiatan Pemantauan dan penyebaran informasi potensi bencana alam	75	5	60	3	100	5	80	4	50	5	40

Tegal, Maret 2014

**KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA
POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KOTA TEGAL**

Drs. SURIPTO
Pembina Tingkat I
NIP. 19590410 198703 1 005

Kriteria VI	8	9	10
Kriteria VI	4	445	1
	4	395	2
	4	445	2
	5	455	1
	4	425	2
Kriteria VI	5	455	1
	4	395	2
	3	370	3

	Urutan dan Prioritas	
	Total Skor	
	Kriteria VI	
	8	10
5	425	1
4	425	
4	415	
4	405	

FORM V RENJA

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016
Kota Tegal

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) : Kantor Kesbangpol dan Limas Kota Tegal

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 19 01 01 01	URUSAN Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri BIDANG URUSAN Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat						
1 19 01 01 02	PROGRAM Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1 KEGIATAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tertib administrasi keuangan dan kegiatan Terbayarnya biaya tagihan rekening telepon kantor	Kota Tegal Kota Tegal	12 bulan 12 bulan	6,000,000	APBD II	Rekening listrik & air dibebankan pada Setda
1 19 01 01 06	1.2 KEGIATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terbayarnya sumbangan wajib jasa raharja/PKB	Kota Tegal	13 unit	3,425,000	APBD II	4 unit kendaraan roda 4 dan 9 unit kendaraan roda 2
1 19 01 01 07	1.3 KEGIATAN Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya honor PA, PPK, PPTK, Bendahara, Pengurus Barang, PPK-SKPD, Staf Administrasi, dll	Kota Tegal	12 bulan	44,220,000	APBD II	
1 19 01 01 10	1.4 KEGIATAN Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kota Tegal	12 bulan	18,000,000	APBD II	
1 19 01 01 11	1.5 KEGIATAN Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya dana untuk cetak dan penggandaan (fotokopi) keperluan kantor	Kota Tegal	12 bulan	10,000,000	APBD II	
1 19 01 01 15	1.6 KEGIATAN Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya 2 surat kabar per hari	Kota Tegal	12 bulan	2,000,000	APBD II	
1 19 01 01 17	1.7 KEGIATAN Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat	Kota Tegal	12 bulan	15,000,000	APBD II	
1 19 01 01 18	1.8 KEGIATAN Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas keluar daerah bagi PNS	Kota Tegal	12 bulan	70,000,000	APBD II	

KODE	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 19 01 02	PROGRAM Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelancaran tugas dan koordinasi	Kota Tegal	12 bulan			
1 19 01 02 05	2.1 KEGIATAN Pengadaan Kendaraan dinas/ Operasional	Tersedianya kendaraan dinas 1 (satu) Kasub Bag dan 3 (tiga) Kepala Seksi	Kota Tegal	x	x		
1 19 01 02 07	2.1 KEGIATAN Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kota Tegal	x	x		
1 19 01 02 22	2.2 KEGIATAN Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Tersedianya alat dan bahan pembersih kantor	Kota Tegal	12 bulan	1,000,000	APBD II	
1 19 01 02 24	2.3 KEGIATAN Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional	Kota Tegal	12 bulan	72,000,000	APBD II	
1 19 01 02 28	2.4 KEGIATAN Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tertaksananya pemeliharaan komputer & printer	Kota Tegal	12 bulan	3,000,000	APBD II	
1 19 01 03	PROGRAM Peningkatan Disiplin Aparatur	Terciptanya keseragaman pakaian dinas PNS	Kota Tegal				
1 19 01 03 02	3.1 KEGIATAN Pengadaan pakaian dinas beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas PNS	Kota Tegal	x	x		
1 19 01 15	PROGRAM Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terciptanya situasi dan kondisi daerah yang stabil dan kondusif	Kota Tegal	12 bulan			
1 19 01 15 03	4.1 KEGIATAN Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	- Terlaksananya pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan bagi 70 orang (3 hari) - Pengiriman Non PNS (Tomas, Toga, LSM, Linmas, dll) keluar daerah	Kota Tegal	70 orang (3 hari)	39,041,000	APBD II	
1 19 01 15 05	4.2 KEGIATAN Pengendalian Keamanan Lingkungan	- Terlaksananya patroli dan pemantauan wilayah - Terlaksananya kegiatan piket posko kantor - Terlaksananya kegiatan pengamanan lebaran, natal, dan tahun baru - Terlaksananya kegiatan pengamanan dan pengaturan parkir kendaraan di kompleks Balai kota - Terlaksananya siskamibmas di tingkat RT	Kota Tegal	27 Kelurahan	490,180,000	APBD II	

KODE	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 19 01 16	PROGRAM Pemeliharaan Kantantimbas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Prosentase Jumlah kasus kriminalitas dibanding tahun lalu	Kota Tegal	75%			
1 19 01 16 02	5.1 KEGIATAN Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	- Terlaksananya kegiatan pemantauan Orang Asing - Terasiliasinya kegiatan KOMINDA - Terasiliasinya kegiatan FKDM	Kota Tegal	12 kegiatan	55,020,000	APBD II	Permendagri no. 49 & 50 th. 2010 Permendagri no. 11 th. 2006 Permendagri no. 12 th. 2006
1 19 01 16 04	5.2 KEGIATAN Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Sistemswakarsa di Daerah	- Terlaksananya pemberian tali asih bagi Limas - Terlaksananya pemberian uang duka bagi ahli waris Limas yang meninggal dunia - Terlaksananya bantuan pengobatan bagi Limas	Kota Tegal	27 orang	66,150,000	APBD II	
1 19 01 17	PROGRAM Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Terciptanya toleransi dan kerukunan hidup masyarakat	Kota Tegal	12 bulan			
1 19 01 17 01	6.1 KEGIATAN Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	Terlaksananya kegiatan diskusi peningkatan kerukunan umat beragama	Kota Tegal	100 orang peserta	11,565,000	APBD II	
1 19 01 17 02	6.2 KEGIATAN Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat	Terlaksananya kegiatan kemah pembauran	Kota Tegal	1 kegiatan (2 hari) 80 orang peserta	17,049,000	APBD II	Permendagri no. 71 th. 2012
1 19 01 17 03	6.3 KEGIATAN Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	- Seleksi dan latihan PaksiBra - Terlaksananya upacara peringatan HUT RI - Terlaksananya upacara peringatan hari besar nasional - Terlaksananya upacara bendera bulanan	Kota Tegal	82 orang	236,590,000	APBD II	Permendagri no. 71 th. 2012
1 19 01 18	PROGRAM Kemitrnaan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Penguatan ketahanan bangsa dan bela negara	Kota Tegal	12 bulan			
1 19 01 18 02	7.1 KEGIATAN Seminar, Talk Show, Diskusi Wawasan Kebangsaan	- Terselenggaranya kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan dan bela negara	Kota Tegal	100 orang peserta	11,510,000	APBD II	Permendagri no. 71 th. 2012
1 19 01 20	PROGRAM Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Rasio kasus penyalahgunaan narkoba dibanding tahun lalu		30%			
1 19 01 20 01	8.1 KEGIATAN Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	- Terlaksananya razia pelajar - Terselenggaranya PAGN bagi pelajar & masyarakat	Kota Tegal	12 kegiatan	28,105,000	APBD II	Permendagri no. 21 th. 2013

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 19 01 21	PROGRAM Pendidikan Politik Masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu	Kota Tegal	60%	x		Permendagri no. 36 th. 2010
1 19 01 21 01	10.1 KEGIATAN Penyuluhan Kepada Masyarakat	- Terselenggaranya pendidikan politik bagi pelajar - Terselenggaranya diskusi politik tingkat kecamatan		x x	x x		
1 19 01 21 03	10.2 KEGIATAN Koordinasi forum-forum diskusi politik	- Terlaksananya verifikasi pengajuan bantuan keuangan bagi partai politik (10 partai) - Terselenggaranya bimbingan teknis pengelolaan bantuan keuangan partai	Kota Tegal	10 partai	23,744,000	APBD II	PP no. 83 th. 2012 & Permendagri no. 26 th. 2013
1 19 01 22	PROGRAM Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Terlindungnya masyarakat dari bencana	Kota Tegal	12 bulan			
1 19 01 22 01	11.1 KEGIATAN Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	- Terlatihnya ilmas dalam melakukan penyelamatan di air (SAR air)	Kota Tegal	60 orang (3 hari)	32,938,000	APBD II	
Jumlah					1,256,537,000		

Tegal, Juni 2014

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA
POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KOTA TEGAL

Drs. SURIPTO
Pembina Tingkat I
NIP. 19590410 198703 1 005

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
9	10
12 bulan	6,000,000
12 bulan	
13 unit	3,549,000
12 bulan	44,220,000
12 bulan	18,000,000
12 bulan	10,000,000
12 bulan	2,000,000
12 bulan	15,000,000
12 bulan	85,000,000

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
9	10
12 bulan	
4 unit	64,675,000
1 unit LCD Proyektor 1 unit Layar LCD 1 unit Laptop	35,035,000
12 bulan	1,000,000
12 bulan	72,000,000
12 bulan	3,000,000
20 orang 20 orang	11,430,000
12 bulan	
100 orang (3 hari)	49,450,000
27 Kejurahan	494,265,000

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
9	10
75%	
12 kegiatan	78,240,000
27 orang	74,542,000
12 bulan	
100 orang peserta	12,005,000
1 kegiatan (2 hari) 100 orang peserta	19,825,000
82 orang	236,590,000
12 bulan	
200 orang peserta	19,880,000
30%	
12 kegiatan	80,885,000

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
9	10
60% 100 orang peserta	55,420,000
10 parpol	11,100,000
12 bulan	
80 orang (3 hari)	38,834,000
	1,541,945,000